

REKAP BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
OPD : BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN		TAMBAH/ (KURANG) (Rp.)
		APBD INDUK (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	Belanja Barang dan Jasa	3,448,422,840	1,858,399,136	(1,590,023,704)
2.	Belanja Bunga	-	-	-
3.	Belanja Subsidi	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-
	1) Hibah Kepada.....	-	-	-
	2) Hibah Kepada.....	-	-	-
	3) Hibah Kepada.....	-	-	-
	4) Hibah Kepada.....	-	-	-
	5) dst.....	-	-	-
				-
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	1) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	2) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	3) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	4) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	5) dst.....	-	-	-
				-
6.	BELANJA MODAL	470,000,000	162,030,000	(307,970,000)
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470,000,000	162,030,000	(307,970,000)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-
7.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
8.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
9.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
				-
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		3,918,422,840	2,020,429,136	(1,897,993,704)

Palembang, Oktober 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DEDI HARAPAN, SH,SE.,M.SI.C.MSP
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP 197809072007011005

RINCIAN PENGURANGAN 60%
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026		BERKURANG 60%	KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.809,260,000	1,227,130,000		
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,100,000	90,100,000	-	
4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,100,000	90,100,000	-	B. Pegawai
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	457,860,000	310,000,000		
4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58,000,000	30,000,000	28,000,000	
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399,860,000	280,000,000	119,860,000	
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665,000,000	665,000,000	-	
4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	665,000,000	665,000,000	-	GAJI P3K PARUH WAKTU
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah	126,300,000	-		
04.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126,300,000	-	126,300,000	
04.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	-	-	-	
5.1.02.01.01.0064	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas	Jumlah Orang yang mendapatkan pakalan dinas lapangan	-	-	-	
4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	470,000,000	162,030,000		
4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	170,000,000	-	170,000,000	
4.01.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-	
4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300,000,000	162,030,000	137,970,000	
4.01.05	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	2,109,162,840	793,299,136		
4.01.05.01.01	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	661,766,544	384,929,680		
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	215,000,000	118,929,680	96,070,320	
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	123,826,719	80,310,175	43,516,544	
4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	107,250,000	80,000,000	27,250,000	

4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	215,689,825	105,689,825	110,000,000
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	1,447,396,296	408,369,456	
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	1,336,300,496	317,273,656	1,019,026,840
4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	111,095,800	91,095,800	20,000,000
JUMLAH			3,918,422,840	2,020,429,136	1,897,993,704

Palembang, Oktober 2025

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DEDI HARAPAN, SH, SE., M.SI.C.MSP

SEKRETARIAT DAERAH TINGKAT I (IV/b)

SUMATERA SELATAN NIP. 197809072007011005

MATRIKULASI PENGURANGAN 60%
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INPUTAN I	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 INPUTAN II		BERKURANG 60%	KETERANGAN
				SEMULA	MENJADI		
1	2	3		4	5	6	7
	SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1,809,260,000	1,809,260,000	1,227,130,000		
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,100,000	90,100,000	90,100,000		
4.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,100,000	90,100,000	90,100,000	-	B. Pegawai
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	457,860,000	457,860,000	310,000,000		
4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		58,000,000	58,000,000	30,000,000	28,000,000	
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399,860,000	399,860,000	280,000,000	119,860,000	
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665,000,000	665,000,000	665,000,000		
4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	665,000,000	665,000,000	665,000,000		GAJI P3K PARUH WAKTU
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah	126,300,000	126,300,000	-		
04.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126,300,000	126,300,000		126,300,000	
04.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan				-	
5.1.02.01.01.0064	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan				-	
4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	470,000,000	470,000,000	162,030,000		
4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	170,000,000	170,000,000		170,000,000	
4.01.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-		
4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	300,000,000	300,000,000	162,030,000	137,970,000	
5.2.2.10.02.0005	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	
4.01.05	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	1,809,162,840	2,109,162,840	793,299,136		
4.01.05.01.01	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	661,766,544	661,766,544	384,929,680		
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	215,000,000	215,000,000	118,929,680		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18,000,000	18,000,000	15,800,000	2,200,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		180,000,000	180,000,000	86,129,680	93,870,320	
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	123,826,719	123,826,719	80,310,175		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6,000,000	6,000,000	15,000,000	-	9,000,000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		112,826,719	112,826,719	60,310,175	52,516,544	
4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	107,250,000	107,250,000	80,000,000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-
5.1.02.01.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia						
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan		24,500,000	24,500,000	7,250,000	17,250,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		55,250,000	55,250,000	45,250,000	10,000,000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	
4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	215,689,825	215,689,825	105,689,825		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		35,689,825	35,689,825	25,689,825	10,000,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		170,000,000	170,000,000	70,000,000	100,000,000	
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	1,147,396,296	1,447,396,296	408,369,456		
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	1,036,300,496	1,336,300,496	317,273,656		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		15,450,496	15,450,496	15,450,496		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		15,350,000	15,350,000	2,850,000	12,500,000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiat Batik Tradisional		16,000,000	16,000,000		16,000,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		45,500,000	45,500,000		45,500,000	
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Beracara		300,000,000	300,000,000	100,000,000	200,000,000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja jasa juri Perlombaan/Pertandingan						
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa elektronik		57,000,000	57,000,000		57,000,000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Bantuan Hukum Cuma-Cuma		200,000,000	500,000,000	100,000,000	400,000,000	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					-	

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		200,000,000	200,000,000	91,973,160	108,026,840
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		125,000,000	125,000,000		125,000,000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan		55,000,000	55,000,000		55,000,000
4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	111,095,800	111,095,800	91,095,800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7,095,800	7,095,800	7,095,800	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,000,000	100,000,000	80,000,000	20,000,000
JUNLAH			3,618,422,840	3,918,422,840	2,020,429,136	1,897,993,704

Palembang, Oktober 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEW. HARAPAN, SH,SE.,M.SI.C.MSP

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP 197809072007011005